



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 162 TAHUN 2026  
TENTANG  
DAFTAR DATA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola data yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satu Data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, perlu menetapkan rincian daftar data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Daftar Data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);
5. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 933);
  6. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Satu Data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 733).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG DAFTAR DATA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan daftar data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan pengumpulan data bagi produsen data di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
- KETIGA : Daftar data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun oleh walidata Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan usulan dari produsen data.
- KEEMPAT : Produsen data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menyerahkan data dan metadata Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal kepada walidata.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Mei 2026  
KEPALA BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN PRODUK HALAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AHMAD HAIKAL HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN  
PRODUK HALAL  
REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia  
dan Hubungan Masyarakat,

Beny Cahyadi  
NIP. 198204102000121001



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 162 TAHUN 2026  
TENTANG  
DAFTAR DATA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TAHUN 2025

**RINCIAN DAFTAR DATA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TAHUN 2025**

| No | Sumber Referensi          | Nama Indikator                     | Nama Data                          | Prioritas / Non Prioritas | Jenis Data | Indikator/ Variabel | Kode Standar Data | Produsen Data                   | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Definisi                                                                                                                                                                                              | Satuan  | Klasifikasi Penyajian                                                     | Jadwal Pemutakhiran | Kategori RAD    |
|----|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 1  |                           | Jumlah pengaduan masyarakat        | Jumlah pengaduan masyarakat        | Non prioritas             | Statistik  | Indikator           | 25010066          | Biro Perencanaan dan Organisasi | Terbuka                        | Banyaknya laporan secara tertulis atau lisan oleh masyarakat kepada instansi pemerintah sesuai kewenangannya tentang suatu masalah, ketidakpuasan, atau keluhan yang dialami oleh seseorang/ kelompok | Dokumen | 1. Wilayah administrasi: Nasional; dan<br>2. Kanal pengaduan              | Tahunan             | Aparatur negara |
| 2  |                           | Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) | Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) | Non prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Biro Perencanaan dan Organisasi | Terbuka                        | Banyaknya UPT BPJPH yang telah dibentuk dan beroperasi secara aktif dalam mendukung penyelenggaraan layanan Jaminan Produk Halal.                                                                     | Lembaga | 1. Wilayah administrasi: Nasional, Provinsi; dan<br>2. Jenis: Balai, Loka | Tahunan             | Aparatur negara |
| 3  | RPJMN 2025-2029/ RKP 2025 | Jumlah anggaran                    | Jumlah anggaran                    | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Biro Perencanaan dan Organisasi | Terbuka                        | Total dana yang tercantum dalam dokumen anggaran resmi (DIPA) yang digunakan untuk                                                                                                                    | Rupiah  | Unit Kerja                                                                | Tahunan             | Keuangan        |

| No | Sumber Referensi                  | Nama Indikator                 | Nama Data                      | Prioritas / Non Prioritas | Jenis Data | Indikator/ Variabel | Kode Standar Data | Produsen Data                   | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Definisi                                                                                                                                                                        | Satuan | Klasifikasi Penyajian          | Jadwal Pemutakhiran | Kategori RAD                     |
|----|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|
|    |                                   |                                |                                |                           |            |                     |                   |                                 |                                | membayai seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, baik di tingkat pusat maupun daerah.                                                      |        |                                |                     |                                  |
| 4  | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Nilai Reformasi Birokrasi (RB) | Nilai Reformasi Birokrasi (RB) | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Biro Perencanaan dan Organisasi | Terbuka                        | Angka yang mencerminkan capaian perbaikan tata kelola pemerintahan, akuntabilitas kinerja, dan kualitas pelayanan publik berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. | Nilai  | Wilayah administrasi: Nasional | Tahunan             | Aparatur negara                  |
| 5  | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Indeks Perencanaan Pembangunan | Indeks Perencanaan Pembangunan | Non prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Biro Perencanaan dan Organisasi | Terbuka                        | Angka yang mencerminkan keselarasan, konsistensi, keterukuran, serta keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.                       | Indeks | Wilayah Administrasi: Nasional | Tahunan             | Perencanaan Pembangunan Nasional |
| 6  | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Nilai kinerja anggaran         | Nilai kinerja anggaran         | Non prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Biro Perencanaan dan Organisasi | Terbuka                        | Angka yang menunjukkan tingkat capaian kinerja pelaksanaan anggaran BPJPH berdasarkan efisiensi, efektivitas, dan kesesuaian antara penggunaan anggaran dengan hasil yang       | Nilai  | Wilayah Administrasi: Nasional | Tahunan             | Keuangan                         |

| No | Sumber Referensi                  | Nama Indikator                                                   | Nama Data                                                        | Prioritas / Non Prioritas | Jenis Data | Indikator/ Variabel | Kode Standar Data | Produsen Data                   | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Definisi                                                                                                                                                                                                   | Satuan | Klasifikasi Penyajian          | Jadwal Pemutakhiran | Kategori RAD    |
|----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|---------------------|-----------------|
|    |                                   |                                                                  |                                                                  |                           |            |                     |                   |                                 |                                | dicapai.                                                                                                                                                                                                   |        |                                |                     |                 |
| 7  | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Indeks kualitas kebijakan                                        | Indeks kualitas kebijakan                                        | Non prioritas             | Statistik  | Indikator           | 25010060          | Biro Perencanaan dan Organisasi | Terbuka                        | Angka yang menunjukkan ukuran kualitas kebijakan yang dihasilkan BPJPH, dilihat dari aspek ketepatan substansi, dasar analisis, manfaat, serta dampak kebijakan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi. | Indeks | Wilayah Administrasi: Nasional | Tahunan             | Aparatur negara |
| 8  | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) | Non prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Biro Perencanaan dan Organisasi | Terbuka                        | Angka yang menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja BPJPH dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan pencapaian kinerja instansi pemerintah.                                               | Nilai  | Wilayah Administrasi: Nasional | Tahunan             | Aparatur negara |
| 9  | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Indeks layanan publik                                            | Indeks layanan publik                                            | Non prioritas             | Statistik  | Indikator           | 25010061          | Biro Perencanaan dan Organisasi | Terbuka                        | Angka yang menunjukkan tingkat kualitas penyelenggaraan pelayanan publik BPJPH berdasarkan aspek aksesibilitas, keterjangkauan, kecepatan, kepastian, kenyamanan, dan kepuasan masyarakat.                 | Indeks | Wilayah Administrasi: Nasional | Tahunan             | Aparatur negara |

| No | Sumber Referensi                  | Nama Indikator                                                                                    | Nama Data                                                                                         | Prioritas / Non Prioritas | Jenis Data | Indikator/ Variabel | Kode Standar Data | Produsen Data                   | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Definisi                                                                                                                                                                                                                                    | Satuan | Klasifikasi Penyajian          | Jadwal Pemutakhiran | Kategori RAD    |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|---------------------|-----------------|
| 10 | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Tingkat kepatuhan standar pelayanan publik                                                        | Tingkat kepatuhan standar pelayanan publik                                                        | Non prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Biro Perencanaan dan Organisasi | Terbuka                        | Angka yang menggambarkan tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan publik terhadap standar pelayanan yang telah ditetapkan, meliputi aspek prosedur, waktu layanan, biaya, produk layanan, sarana prasarana, serta kompetensi pelaksana. | Indeks | Wilayah Administrasi: Nasional | Tahunan             | Aparatur negara |
| 11 | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan                        | Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan                        | Non prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Biro Perencanaan dan Organisasi | Terbuka                        | Angka yang menunjukkan persentase pengaduan masyarakat yang diterima melalui sistem LAPOR yang telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang berlaku.                                                 | Indeks | Wilayah Administrasi: Nasional | Tahunan             | Aparatur negara |
| 12 | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Persentase unit kerja yang diusulkan memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat | Persentase unit kerja yang diusulkan memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat | Non prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Biro Perencanaan dan Organisasi | Terbuka                        | Proporsi unit kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dibandingkan dengan total unit kerja yang memenuhi kriteria pengusulan.                     | Persen | Wilayah Administrasi: Nasional | Tahunan             | Aparatur negara |

| No | Sumber Referensi                  | Nama Indikator                               | Nama Data                                    | Prioritas / Non Prioritas | Jenis Data | Indikator/ Variabel | Kode Standar Data | Produsen Data                                           | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Definisi                                                                                                                                                                                                                                         | Satuan | Klasifikasi Penyajian          | Jadwal Pemutakhiran | Kategori RAD    |
|----|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|---------------------|-----------------|
|    |                                   | Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)     | Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)     |                           |            |                     |                   |                                                         |                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                |                     |                 |
| 13 | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern | Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Biro Perencanaan dan Organisasi                         | Terbuka                        | Angka yang menunjukkan tingkat kematangan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dalam organisasi, yang mencerminkan efektivitas pengendalian terhadap risiko, kepatuhan terhadap peraturan, serta keandalan pelaporan dan operasional. | Indeks | Wilayah Administrasi: Nasional | Tahunan             | Aparatur Negara |
|    |                                   |                                              |                                              |                           |            |                     |                   |                                                         |                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                |                     |                 |
| 14 |                                   | Jumlah produk hukum yang diterbitkan         | Jumlah produk hukum yang diterbitkan         | Non prioritas             | Statistik  | Indikator           | 10810014          | Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat | Terbuka                        | Banyaknya Produk hukum yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, peraturan turunan, keputusan kepala badan, pedoman teknis, standar operasional prosedur, serta bentuk regulasi lainnya yang diterbitkan.                                  | Naskah | Jenis produk hukum             | Triwulan            | Aparatur negara |

| No | Sumber Referensi                  | Nama Indikator         | Nama Data              | Prioritas / Non Prioritas | Jenis Data | Indikator/ Variabel | Kode Standar Data | Produsen Data                                           | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Satuan | Klasifikasi Penyajian                                                                                 | Jadwal Pemutakhiran | Kategori RAD    |
|----|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 15 | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Indeks Reformasi Hukum | Indeks Reformasi Hukum | Non prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat | Terbuka                        | Angka yang menggambarkan tingkat kemajuan dan kualitas pelaksanaan reformasi hukum dalam suatu instansi atau wilayah, yang dihitung berdasarkan sejumlah indikator yang mencerminkan aspek regulasi, kelembagaan, penegakan hukum, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam periode waktu tertentu.         | Indeks | Wilayah Administrasi: Nasional                                                                        | Tahunan             | Aparatur negara |
| 16 |                                   | Jumlah ASN BPJPH       | Jumlah ASN BPJPH       | Non prioritas             | Statistik  | Indikator           | 25010050          | Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat | Terbuka                        | Banyaknya calon pegawai negeri sipil (CPNS), pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, serta disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya, dan diberikan gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. | Total  | 1. Jenis ASN: PNS, CPNS, PPPK;<br>2. Satuan Kerja;<br>3. Umur;<br>4. Jabatan; dan<br>5. Jenis Kelamin | Bulanan             | Aparatur negara |

| No | Sumber Referensi | Nama Indikator                                                      | Nama Data                                                           | Prioritas / Non Prioritas | Jenis Data | Indikator/ Variabel | Kode Standar Data | Produsen Data                                           | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Definisi                                                                                                                                                                                             | Satuan | Klasifikasi Penyajian                  | Jadwal Pemutakhiran | Kategori RAD    |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 17 |                  | Jumlah PNS yang pensiun                                             | Jumlah PNS yang pensiun                                             | Non prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat | Terbuka                        | Banyaknya Pegawai Negeri Sipil yang secara resmi berhenti dari status kepegawaiannya karena mencapai batas usia pensiun atau memenuhi ketentuan pensiun lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. | Total  | 1. Unit kerja; dan<br>2. Keterangan    | Triwulan            | Aparatur negara |
| 18 |                  | Jumlah ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi dan administrator | Jumlah ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi dan administrator | Non prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat | Terbuka                        | Banyaknya ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi dan administrator.                                                                                                                              | Total  | Unit kerja                             | Bulanan             | Aparatur negara |
| 19 |                  | Jumlah ASN yang menjalani tugas Belajar                             | Jumlah ASN yang menjalani tugas Belajar                             | Non prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat | Terbuka                        | Banyaknya ASN yang menjalani tugas belajar.                                                                                                                                                          | Total  | 1. Unit kerja; dan<br>2. Program Studi | Tahunan             | Aparatur negara |
| 20 |                  | Jumlah ASN yang menjalani hukuman disiplin                          | Jumlah ASN yang menjalani hukuman disiplin                          | Non prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat | Terbatas                       | Banyaknya ASN yang menjalani hukuman disiplin (ringan, sedang, dan berat).                                                                                                                           | Total  | Unit kerja                             | Tahunan             | Aparatur negara |
| 21 |                  | Jumlah mutasi ASN                                                   | Jumlah mutasi ASN                                                   | Non prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat | Terbatas                       | Banyaknya ASN yang mutasi di BPJPH.                                                                                                                                                                  | Total  | Unit kerja                             | Bulanan             | Aparatur negara |

| No | Sumber Referensi                  | Nama Indikator                   | Nama Data                        | Prioritas / Non Prioritas | Jenis Data | Indikator/ Variabel | Kode Standar Data | Produsen Data                                           | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Satuan | Klasifikasi Penyajian                                             | Jadwal Pemutakhiran | Kategori RAD    |
|----|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 22 |                                   | Persentase penilaian kinerja ASN | Persentase penilaian kinerja ASN | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat | Terbuka                        | Persentase penilaian kinerja ASN BPJPH berdasarkan penilaian pada E-kinerja BKN.                                                                                                                                                                                                                                           | Persen | 1. Predikat kinerja;<br>2. Perilaku kinerja; dan<br>3. Unit kerja | Triwulan            | Aparatur negara |
| 23 |                                   | Indeks Kualitas Data ASN         | Indeks Kualitas Data ASN         | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat | Terbuka                        | Angka yang menggambarkan kualitas data ASN BPJPH pada SIAN BKN.                                                                                                                                                                                                                                                            | Indeks | Wilayah Administrasi: Nasional                                    | Tahunan             | Aparatur negara |
| 24 | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Indeks Sistem Merit              | Indeks Sistem Merit              | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | 23010079          | Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat | Terbuka                        | Angka yang menggambarkan tingkat penerapan kebijakan dan manajemen sumber daya manusia (SDM) yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. | Indeks | Wilayah Administrasi: Nasional                                    | Tahunan             | Aparatur negara |
| 25 | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Indeks Profesionalitas ASN       | Indeks Profesionalitas ASN       | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat | Terbuka                        | Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan                                                                                                                                         | Indeks | Wilayah Administrasi: Nasional                                    | Tahunan             | Aparatur negara |

| No | Sumber Referensi                  | Nama Indikator                                                                 | Nama Data                                                                      | Prioritas / Non Prioritas | Jenis Data | Indikator/ Variabel | Kode Standar Data | Produsen Data                                           | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Definisi                                                                                                                                                                                                          | Satuan         | Klasifikasi Penyajian                                                                                                                     | Jadwal Pemutakhiran | Kategori RAD    |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
|    |                                   |                                                                                |                                                                                |                           |            |                     |                   |                                                         |                                | pegawai dalam melaksanakan tugas jabatannya.                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                           |                     |                 |
| 26 | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Indeks Keterbukaan Informasi Publik                                            | Indeks Keterbukaan Informasi Publik                                            | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | 25010046          | Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat | Terbuka                        | Angka yang menggambarkan kondisi keterbukaan informasi publik pada badan publik daerah dan nasional yang dipotret dari tiga dimensi, yang terdiri dari dimensi fisik/politik, dimensi ekonomi, dan dimensi hukum. | Indeks         | Wilayah Administrasi: Nasional                                                                                                            | Tahunan             | Aparatur negara |
| 27 | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | <i>Engagement</i> (tingkat interaksi) halal dalam <i>platform</i> sosial media | <i>Engagement</i> (tingkat interaksi) halal dalam <i>platform</i> sosial media | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat | Terbuka                        | Ukuran yang menunjukkan tingkat interaksi/ <i>engagement</i> dalam aktivitas komunikasi dan publikasi media sosial instagram BPJPH.                                                                               | Persen         | Wilayah Administrasi: Nasional                                                                                                            | Tahunan             | Agama           |
|    |                                   |                                                                                |                                                                                |                           |            |                     |                   |                                                         |                                |                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                           |                     |                 |
| 28 |                                   | Jumlah aset tanah/gedung                                                       | Jumlah aset tanah/gedung                                                       | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Biro Umum dan Keuangan                                  | Terbuka                        | Banyaknya aset tetap yang merupakan kekayaan berwujud yang dimiliki oleh BPJPH.                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 1. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi;<br>2. Satuan Kerja;<br>3. Lokasi;<br>4. Luas Tanah;<br>5. Kondisi Bangunan; dan<br>6. Status | Tahunan             | Keuangan        |

| No | Sumber Referensi | Nama Indikator              | Nama Data                   | Prioritas / Non Prioritas | Jenis Data | Indikator/ Variabel | Kode Standar Data | Produsen Data          | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Definisi                                                                                                                                                                                         | Satuan | Klasifikasi Penyajian                                                                                       | Jadwal Pemutakhiran | Kategori RAD |
|----|------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|---------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 29 |                  | Jumlah BMN                  | Jumlah BMN                  | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Biro Umum dan Keuangan | Terbuka                        | Banyaknya barang milik negara yang dimiliki BPJPH.                                                                                                                                               | Unit   | 1. Wilayah: Nasional, Provinsi;<br>2. Satuan Kerja;<br>3. Lokasi;<br>4. Kondisi BMN; dan<br>5. Status       | Tahunan             | Keuangan     |
| 30 |                  | Jumlah paket pengadaan      | Jumlah paket pengadaan      | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Biro Umum dan Keuangan | Terbuka                        | Total akumulasi seluruh paket pengadaan barang/jasa yang direncanakan dan dilaksanakan oleh BPJPH melalui mekanisme pengadaan secara elektronik maupun manual dalam satu periode tahun anggaran. | Paket  | Unit Kerja                                                                                                  | Tahunan             | Keuangan     |
| 31 |                  | Jumlah pendapatan BLU       | Jumlah pendapatan BLU       | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Biro Umum dan Keuangan | Terbuka                        | Banyaknya pendapatan BLU BPJPH.                                                                                                                                                                  | Rupiah | 1. Jenis Layanan; dan<br>2. Periode: Tahun                                                                  | Tahunan             | Keuangan     |
| 32 |                  | Jumlah aset kendaraan dinas | Jumlah aset kendaraan dinas | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Biro Umum dan Keuangan | Terbuka                        | Banyaknya kendaraan dinas yang dimiliki BPJPH.                                                                                                                                                   | Unit   | 1. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi;<br>2. Satuan Kerja;<br>3. Lokasi;<br>4. Kondisi Kendaraan; dan | Tahunan             | Keuangan     |

| No | Sumber Referensi                  | Nama Indikator               | Nama Data                    | Prioritas / Non Prioritas | Jenis Data | Indikator/ Variabel | Kode Standar Data | Produsen Data          | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Satuan             | Klasifikasi Penyajian          | Jadwal Pemutakhiran | Kategori RAD |
|----|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|
|    |                                   |                              |                              |                           |            |                     |                   |                        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 5. Status                      |                     |              |
| 33 | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Opini Laporan Keuangan (WTP) | Opini Laporan Keuangan (WTP) | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Biro Umum dan Keuangan | Terbuka                        | Angka yang menunjukkan status hasil pemeriksaan auditor terhadap laporan keuangan instansi pemerintah dengan kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai bentuk bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Predikat/ Kategori | Wilayah Administrasi: Nasional | Tahunan             | Keuangan     |
| 34 | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Indeks Tata Kelola Pengadaan | Indeks Tata Kelola Pengadaan | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Biro Umum dan Keuangan | Terbuka                        | Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan efektivitas pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah. ITKP bertujuan untuk memastikan proses pengadaan berjalan profesional, efisien, efektif, transparan, kompetitif, adil, dan akuntabel.                                          | Predikat/ Kategori | Wilayah Administrasi: Nasional | Tahunan             | Keuangan     |

| No | Sumber Referensi                  | Nama Indikator                          | Nama Data                               | Prioritas / Non Prioritas | Jenis Data | Indikator/ Variabel | Kode Standar Data | Produsen Data          | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Satuan             | Klasifikasi Penyajian          | Jadwal Pemutakhiran | Kategori RAD    |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|
| 35 | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Tingkat digitalisasi arsip              | Tingkat digitalisasi arsip              | Non prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Biro Umum dan Keuangan | Terbuka                        | Ukuran yang menggambarkan banyaknya arsip yang telah dialihkan dari bentuk fisik ke bentuk digital melalui proses pemindaian, perekaman, atau konversi elektronik sehingga dapat disimpan, dikelola, dan diakses secara digital sesuai ketentuan pengelolaan kearsipan.                                                                                              | Predikat/ kategori | Wilayah Administrasi: Nasional | Tahunan             | Aparatur negara |
| 36 | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) | Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) | Non prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Biro Umum dan Keuangan | Terbuka                        | Angka ini menunjukkan persentase total paket pengadaan yang telah diumumkan dalam RUP terhadap total rencana paket yang direncanakan. Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah dokumen perencanaan awal pengadaan barang/jasa pemerintah yang disusun oleh setiap Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah (K/L/PD) berdasarkan DIPA/ DPA atau dokumen perencanaan anggaran. | Persen             | Wilayah Administrasi: Nasional | Tahunan             | Keuangan        |

| No | Sumber Referensi                  | Nama Indikator                                   | Nama Data                                         | Prioritas / Non Prioritas | Jenis Data | Indikator/ Variabel | Kode Standar Data | Produsen Data          | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Satuan            | Klasifikasi Penyajian          | Jadwal Pemutakhiran | Kategori RAD |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|
| 37 | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Indeks Pengelolaan Aset (IPA)                    | Indeks Pengelolaan Aset (IPA)                     | Non prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Biro Umum dan Keuangan | Terbuka                        | Nilai indeks yang menggambarkan tingkat kualitas dan kinerja pengelolaan aset/barang milik negara pada suatu instansi, yang diukur berdasarkan aspek perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, pemeliharaan, pengamanan, hingga pelaporan aset sesuai ketentuan pengelolaan barang milik negara. | Indeks            | Wilayah Administrasi: Nasional | Tahunan             | Keuangan     |
| 38 | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Indikator kinerja pelaksanaan anggaran           | Indikator kinerja pelaksanaan anggaran            | Non prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Biro Umum dan Keuangan | Terbuka                        | Nilai yang menggambarkan kualitas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan satuan kerja, khususnya dari sisi perencanaan, kepatuhan, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.                                                                                                           | Predikat/kategori | Wilayah Administrasi: Nasional | Tahunan             | Keuangan     |
| 39 | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) | Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaa n (TLHP) | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Biro Umum dan Keuangan | Terbuka                        | Ukuran yang menunjukkan perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh                                                                                                                                                                          | Persen            | Wilayah Administrasi: Nasional | Tahunan             | Keuangan     |

| No | Sumber Referensi                  | Nama Indikator                                                 | Nama Data                                                      | Prioritas / Non Prioritas | Jenis Data | Indikator/ Variabel | Kode Standar Data | Produsen Data          | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Satuan             | Klasifikasi Penyajian          | Jadwal Pemutakhiran | Kategori RAD |
|----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|
|    |                                   |                                                                |                                                                |                           |            |                     |                   |                        |                                | satuan kerja/unit organisasi dengan total rekomendasi hasil pemeriksaan yang diterima dari lembaga pemeriksa, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), atau Inspektorat Jenderal/ Kementerian.                                                                                                            |                    |                                |                     |              |
| 40 | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Nilai kesimpulan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) | Nilai kesimpulan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) | Non prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Biro Umum dan Keuangan | Terbuka                        | Nilai hasil penilaian atas penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada kementerian, lembaga, atau satuan kerja dalam memastikan laporan keuangan disusun secara akurat, andal, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sehingga memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan atau kecurangan yang material. | Predikat/ Kategori | Wilayah Administrasi: Nasional | Tahunan             | Keuangan     |

| No | Sumber Referensi                  | Nama Indikator                                                         | Nama Data                                                              | Prioritas / Non Prioritas | Jenis Data | Indikator/ Variabel | Kode Standar Data | Produsen Data                       | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Satuan  | Klasifikasi Penyajian                                                                                                                                                                                | Jadwal Pemutakhiran | Kategori RAD |
|----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 41 | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Jumlah kesepakatan kerja sama Penyelenggaraan JPH yang terimplementasi | Jumlah kesepakatan kerja sama penyelenggaraan JPH yang terimplementasi | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Direktorat Kemitraan dan Kerja Sama | Terbuka                        | Banyaknya kesepakatan antara para pihak dalam rangka mendukung penyelenggaraan Jaminan Produk Halal melalui kegiatan fasilitasi, pembinaan, dan/atau percepatan sertifikasi halal, yang telah ditindaklanjuti dan direalisasikan sesuai dengan kewenangan masing-masing serta ketentuan peraturan perundang-undangan.                          | Dokumen | 1. Wilayah Administrasi: Provinsi, Negara;<br>2. Jenis: MoU, MRA, PKS, RA;<br>3. Kategori Kerja Sama: Sosialisasi, Sinergi antar Lembaga, dll; dan<br>4. Jenis Kerja Sama: Dalam Negeri, Luar Negeri | Tahunan             | Agama        |
| 42 | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Jumlah kesepakatan kerjasama penyelenggaraan JPH yang disepakati       | Jumlah kesepakatan kerjasama penyelenggaraan JPH yang disepakati       | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Direktorat Kemitraan dan Kerja Sama | Terbuka                        | Banyaknya kesepakatan kerja sama antara para pihak dalam rangka mendukung penyelenggaraan Jaminan Produk Halal melalui kegiatan fasilitasi, pembinaan, dan/atau percepatan sertifikasi halal, yang telah disetujui dan ditandatangani secara resmi oleh para pihak sesuai dengan kewenangan masing-masing serta ketentuan peraturan perundang- | Dokumen | 1. Wilayah Administrasi: Provinsi, Negara;<br>2. Jenis: MoU, MRA, PKS, RA;<br>3. Kategori Kerja Sama: Sosialisasi, Sinergi antar Lembaga, dll; dan<br>4. Jenis Kerja Sama: Dalam Negeri, Luar Negeri | Tahunan             | Agama        |

| No | Sumber Referensi                  | Nama Indikator                                     | Nama Data                                          | Prioritas / Non Prioritas | Jenis Data | Indikator/ Variabel | Kode Standar Data | Produsen Data                  | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Definisi                                                                                                                                                                                                                             | Satuan  | Klasifikasi Penyajian                                                                                                           | Jadwal Pemutakhiran | Kategori RAD |
|----|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
|    |                                   |                                                    |                                                    |                           |            |                     |                   |                                |                                | undangan.                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                 |                     |              |
| 43 | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Jumlah standar dan pedoman Jaminan Produk Halal    | Jumlah standar dan pedoman Jaminan Produk Halal    | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Direktorat Standardisasi Halal | Terbuka                        | Banyaknya dokumen standar dan pedoman yang disusun, ditetapkan, dan/atau diberlakukan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, baik yang mengatur proses, tata cara, persyaratan, maupun mekanisme pelaksanaan JPH. | Dokumen | 1. Jenis: PMA/KMA/Peraturan/KEPKABAN; dan<br>2. Periode: Tahun                                                                  | Tahunan             | Agama        |
| 44 | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Jumlah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) terakreditasi | Jumlah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) terakreditasi | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Direktorat Standardisasi Halal | Terbuka                        | Banyaknya Lembaga Pemeriksa Halal yang telah memperoleh status akreditasi dari instansi yang berwenang karena telah memenuhi persyaratan dan standar penyelenggaraan pemeriksaan halal.                                              | Lembaga | 1. Wilayah Administrasi: Provinsi, Kab/Kota;<br>2. Jenis LPH: Pemerintah, Masyarakat; dan<br>3. Kualifikasi LPH: Pratama, Utama | Triwulan            | Agama        |

| No | Sumber Referensi                  | Nama Indikator                                                                    | Nama Data                                                                         | Prioritas / Non Prioritas | Jenis Data | Indikator/ Variabel | Kode Standar Data | Produsen Data                  | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Definisi                                                                                                                                                                                                                 | Satuan      | Klasifikasi Penyajian                                                                                                                                               | Jadwal Pemutakhiran | Kategori RAD |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 45 | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Jumlah Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) terakreditasi                             | Jumlah Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) terakreditasi                             | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Direktorat Standardisasi Halal | Terbuka                        | Banyaknya lembaga halal luar negeri yang telah memperoleh status akreditasi atau pengakuan dari instansi yang berwenang di Indonesia karena telah memenuhi persyaratan dan standar penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. | Lembaga     | Asal LHLN: Negara                                                                                                                                                   | Triwulan            | Agama        |
| 46 | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Jumlah Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang telah dilakukan penilaian kesesuaian | Jumlah Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang telah dilakukan penilaian kesesuaian | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Direktorat Standardisasi Halal | Terbuka                        | Banyaknya lembaga halal luar negeri yang telah melalui proses penilaian kesesuaian oleh instansi yang berwenang untuk menilai pemenuhan persyaratan dan standar penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.                    | Persen      | 1. Asal LHLN: Negara; dan<br>2. Ruang Lingkup: Makanan dan minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, baranggunaan, dan Jasa | Tahunan             | Agama        |
| 47 | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Jumlah keseluruhan nomor Registrasi Sertifikat                                    | Jumlah keseluruhan nomor Registrasi Sertifikat                                    | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Direktorat Registrasi Halal    | Terbuka                        | Akumulasi nomor RSHLN yang diterbitkan oleh BPJPH dari SHLN yang diregistrasikan agar dapat digunakan                                                                                                                    | Nomor RSHLN | 1. Wilayah Administrasi: Negara LHLN;<br>2. Lembaga                                                                                                                 | Triwulan            | Agama        |

| No | Sumber Referensi                  | Nama Indikator                                                            | Nama Data                                                                 | Prioritas / Non Prioritas | Jenis Data | Indikator / Variabel | Kode Standar Data | Produsen Data               | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Definisi                                                                                                                                                                      | Satuan | Klasifikasi Penyajian                                                                                               | Jadwal Pemutakhiran | Kategori RAD |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
|    |                                   | Halal Luar Negeri (RSHLN) Terbit                                          | Halal Luar Negeri (RSHLN) Terbit                                          |                           |            |                      |                   |                             |                                | sebagai dasar peredaran produk halal di wilayah Indonesia pada periode tertentu.                                                                                              |        | Halal Luar Negeri (LHLN); dan<br>3. Ruang Lingkup                                                                   |                     |              |
| 48 | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Jumlah keseluruhan produk Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri (RSHLN) | Jumlah keseluruhan produk Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri (RSHLN) | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator            | Belum ada         | Direktorat Registrasi Halal | Terbuka                        | Akumulasi jumlah produk yang tercantum dalam SHLN yang terregistrasi dan diakui oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam periode waktu tertentu.           | Produk | 1. Wilayah Administrasi: Negara LHLN;<br>2. Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN); dan<br>3. Ruang lingkup               | Triwulan            | Agama        |
| 49 |                                   | Jumlah Auditor Halal teregistrasi                                         | Jumlah Auditor Halal teregistrasi                                         | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator            | Belum ada         | Direktorat Registrasi Halal | Terbuka                        | Banyaknya auditor halal yang telah terdaftar secara resmi pada instansi yang berwenang dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan/atau audit halal. | Orang  | 1. Asal LPH;<br>2. Status kerja;<br>3. Jenjang pendidikan; dan<br>4. Jenis kelamin                                  | Tahunan             | Agama        |
| 50 | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Persentase Sertifikat Halal Luar Negeri (SHLN) yang diregistrasikan       | Persentase Sertifikat Halal Luar Negeri (SHLN) yang diregistrasikan       | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator            | Belum ada         | Direktorat Registrasi Halal | Terbuka                        | Persentase pengajuan registrasi SHLN yang diterbitkan.                                                                                                                        | Persen | 1. Wilayah Administrasi: Negara LHLN;<br>2. Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN);<br>3. Ruang Lingkup; dan<br>4. Status | Triwulan            | Agama        |

| No | Sumber Referensi                  | Nama Indikator                                                                                                         | Nama Data                                                                                                              | Prioritas / Non Prioritas | Jenis Data | Indikator/ Variabel | Kode Standar Data | Produsen Data                | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Definisi                                                                                                                                                                                                                                        | Satuan | Klasifikasi Penyajian                                                                      | Jadwal Pemutakhiran | Kategori RAD |
|----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
|    |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                           |            |                     |                   |                              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |        | RSHLN                                                                                      |                     |              |
| 51 | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Persentase layanan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri (RSHLN) sesuai dengan <i>Service Level Agreement</i> (SLA). | Persentase layanan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri (RSHLN) sesuai dengan <i>Service Level Agreement</i> (SLA). | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Direktorat Registrasi Halal  | Tertutup                       | Persentase layanan verifikasi dokumen SHLN yang diregistrasikan ke BPJPH sesuai ketentuan SLA layanan RSHLN (13 HK).                                                                                                                            | Persen | Per verifikator                                                                            | Triwulan            | Agama        |
|    |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                           |            |                     |                   |                              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                            |                     |              |
| 52 | RPJMN 2025-2029                   | Indeks kepuasan layanan Sertifikasi Halal                                                                              | Indeks kepuasan layanan Sertifikasi Halal                                                                              | Prioritas                 | Statistik  | Indikator           | 25010045          | Direktorat Sertifikasi Halal | Terbuka                        | Penilaian pengguna layanan terhadap kinerja penyelenggara layanan sertifikasi halal yang mencakup aspek kecepatan, kemudahan, kejelasan prosedur, transparansi biaya, kompetensi petugas, serta kualitas sarana dan prasarana pendukung layanan | Indeks | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi                                                   | Tahunan             | Agama        |
| 53 | RPJMN 2025-2029                   | Jumlah produk tersertifikasi halal                                                                                     | Jumlah produk tersertifikasi halal                                                                                     | Prioritas                 | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Direktorat Sertifikasi Halal | Terbuka                        | Banyaknya produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.                                                                                                                                                                       | Produk | 1. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi<br>2. Jalur pendaftaran: <i>Self Declare</i> , | Tahunan             | Agama        |

| No | Sumber Referensi | Nama Indikator          | Nama Data               | Prioritas / Non Prioritas | Jenis Data | Indikator/ Variabel | Kode Standar Data | Produsen Data                | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Definisi                                                                                                                                                      | Satuan     | Klasifikasi Penyajian                                                                                                                                                                                                                | Jadwal Pemutakhiran | Kategori RAD |
|----|------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|---------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
|    |                  |                         |                         |                           |            |                     |                   |                              |                                |                                                                                                                                                               |            | Reguler, Fasilitas, <i>Self Declare</i> Mandiri<br>3. Skala Usaha: Mikro, Kecil, Menengah, Besar<br>4. Jenis produk: makanan dan minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna |                     |              |
| 54 |                  | Jumlah Sertifikat Halal | Jumlah Sertifikat Halal | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | 10910102          | Direktorat Sertifikasi Halal | Terbuka                        | Banyaknya surat keterangan (pernyataan) atas kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan fatwa halal resmi yang berlaku. | Sertifikat | 1. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi;<br>2. Jalur pendaftaran: <i>Self Declare</i> , Reguler, Fasilitas, <i>Self Declare</i> Mandiri;<br>3. Skala usaha:                                                                      | Tahunan             | Agama        |

| No | Sumber Referensi                  | Nama Indikator                                                                          | Nama Data                                                               | Prioritas / Non Prioritas | Jenis Data | Indikator/ Variabel | Kode Standar Data | Produsen Data                | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Definisi                                                                                                                                                                | Satuan              | Klasifikasi Penyajian                                                                                                                                                   | Jadwal Pemutakhiran | Kategori RAD |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
|    |                                   |                                                                                         |                                                                         |                           |            |                     |                   |                              |                                |                                                                                                                                                                         |                     | mikro, kecil, ,menengah, besar; dan<br>4. Jenis produk: makanan dan minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna |                     |              |
| 55 | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Jumlah pelaku usaha bersertifikasi halal                                                | Jumlah pelaku usaha bersertifikasi halal                                | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Direktorat Sertifikasi Halal | Terbuka                        | Banyaknya Pelaku Usaha yang telah memperoleh sertifikat halal.                                                                                                          | Pelaku Usaha/ Orang | 1. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; dan<br>2. Skala Usaha: Mikro, Kecil, Menengah, Besar                                                                       | Tahunan             | Industri     |
| 56 | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Persentase layanan sertifikasi halal sesuai dengan <i>service level agreement</i> (SLA) | Persentase layanan sertifikasi halal sesuai dengan <i>service Level</i> | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Direktorat Sertifikasi Halal | Terbatas                       | Perbandingan antara jumlah layanan sertifikasi halal yang diselesaikan sesuai dengan standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan dalam <i>Service Level Agreement</i> | Persen              | Waktu layanan: BPJPH, LPH, LP3H, Komite Fatwa, Komisi Fatwa MUI                                                                                                         | Tahunan             | Agama        |

| No | Sumber Referensi | Nama Indikator                                                             | Nama Data                                                                  | Prioritas / Non Prioritas | Jenis Data | Indikator/ Variabel | Kode Standar Data | Produsen Data                        | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Definisi                                                                                                                                                                  | Satuan  | Klasifikasi Penyajian                                                                                                             | Jadwal Pemutakhiran | Kategori RAD |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
|    |                  |                                                                            | Agreement (SLA)                                                            |                           |            |                     |                   |                                      |                                | (SLA) terhadap total layanan sertifikasi halal yang diselesaikan.                                                                                                         |         |                                                                                                                                   |                     |              |
| 57 |                  | Jumlah Lembaga Pendamping Proses Produk Halal                              | Jumlah Lembaga Pendamping Proses Produk Halal                              | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Direktorat Bina Jaminan Produk Halal | Terbuka                        | Banyaknya lembaga yang telah ditetapkan atau terdaftar secara resmi oleh instansi yang berwenang untuk melaksanakan pendampingan proses produk halal kepada pelaku usaha. | Lembaga | 1. Wilayah Administrasi: Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan; dan<br>2. Jenis Lembaga: Instansi Pemerintah, Ormas, dan Perguruan Tinggi | Bulanan             | Agama        |
| 58 |                  | Jumlah Lembaga Pelatihan (LPK) / Lembaga Pelaksana Pelatihan JPH (LPP JPH) | Jumlah Lembaga Pelatihan (LPK) / Lembaga Pelaksana Pelatihan JPH (LPP JPH) | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | 10210021          | Direktorat Bina Jaminan Produk Halal | Terbuka                        | Banyaknya lembaga yang telah ditetapkan, terdaftar, dan/atau diakui oleh instansi yang berwenang untuk menyelenggarakan pelatihan terkait Jaminan Produk Halal.           | Lembaga | 1. Wilayah: Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan; dan<br>2. Jenis Pelatihan: Auditor Halal, Penyelia Halal, Juru Sembelih Halal          | Tahunan             | Agama        |

| No | Sumber Referensi                  | Nama Indikator                                 | Nama Data                                      | Prioritas / Non Prioritas | Jenis Data | Indikator/ Variabel | Kode Standar Data | Produsen Data                        | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Definisi                                                                                                                                                   | Satuan | Klasifikasi Penyajian                                                            | Jadwal Pemutakhiran | Kategori RAD |
|----|-----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 59 |                                   | Jumlah Auditor Halal terlatih                  | Jumlah Auditor Halal terlatih                  | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Direktorat Bina Jaminan Produk Halal | Terbuka                        | Banyaknya Auditor Halal yang telah memperoleh sertifikat pelatihan Auditor Halal dan/atau sertifikat kompetensi Auditor Halal.                             | Orang  | Asal lembaga pelatihan                                                           | Bulanan             | Agama        |
| 60 |                                   | Jumlah Penyelia Halal terlatih                 | Jumlah Penyelia Halal terlatih                 | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Direktorat Bina Jaminan Produk Halal | Terbuka                        | Banyaknya Penyelia Halal yang telah memperoleh sertifikat pelatihan Penyelia Halal.                                                                        | Orang  | Asal lembaga pelatihan                                                           | Bulanan             | Agama        |
| 61 |                                   | Jumlah Juru Sembelih Halal terlatih            | Jumlah Juru Sembelih Halal terlatih            | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Direktorat Bina Jaminan Produk Halal | Terbuka                        | Banyaknya Juru Sembelih Halal yang telah memperoleh sertifikat pelatihan Juru Sembelih Halal.                                                              | Orang  | Asal lembaga pelatihan                                                           | Bulanan             | Agama        |
| 62 |                                   | Jumlah Pendamping Proses Produk Halal Terlatih | Jumlah Pendamping Proses Produk Halal Terlatih | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Direktorat Bina Jaminan Produk Halal | Terbuka                        | Banyaknya Pendamping Proses Produk Halal yang telah memperoleh sertifikat pelatihan pendamping proses produk halal.                                        | Orang  | 1. Asal pendamping PPH<br>2. Wilayah Administrasi: Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan | Bulanan             | Agama        |
| 63 | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Tingkat literasi produk dan jasa halal         | Tingkat literasi produk dan jasa halal         | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Direktorat Bina Jaminan Produk Halal | Terbuka                        | Tingkat pemahaman individu atau masyarakat mengenai informasi terkait produk dan jasa halal, termasuk kesadaran tentang pentingnya sertifikasi halal serta | Persen | Wilayah Administrasi: Nasional                                                   | Tahunan             | Agama        |

| No | Sumber Referensi                  | Nama Indikator                                                             | Nama Data                                                                  | Prioritas / Non Prioritas | Jenis Data | Indikator/ Variabel | Kode Standar Data | Produsen Data                        | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Satuan | Klasifikasi Penyajian          | Jadwal Pemutakhiran | Kategori RAD |
|----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|---------------------|--------------|
|    |                                   |                                                                            |                                                                            |                           |            |                     |                   |                                      |                                | implikasinya terhadap aspek agama, kesehatan, dan ekonomi, yang diukur melalui metode tertentu dalam periode waktu tertentu.                                                                                                                                                                   |        |                                |                     |              |
| 64 | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Persentase SDM Halal yang berkompeten                                      | Persentase SDM Halal yang berkompeten                                      | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Direktorat Bina Jaminan Produk Halal | Terbuka                        | Perbandingan antara jumlah SDM halal yang telah memenuhi standar kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku terhadap total SDM halal dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, yang terdiri dari auditor halal, pendamping Proses Produk Halal (P3H), juru sembelih halal, dan penyelia halal. | Persen | Wilayah Administrasi: Nasional | Tahunan             | Agama        |
| 65 | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Persentase lembaga yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan | Persentase lembaga yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Direktorat Bina Jaminan Produk Halal | Terbuka                        | Perbandingan antara jumlah lembaga JPH yang mengalami peningkatan pemahaman setelah mendapatkan kegiatan pembinaan terhadap total lembaga JPH yang mendapatkan pembinaan.                                                                                                                      | Persen | Wilayah Administrasi: Nasional | Tahunan             | Agama        |

| No | Sumber Referensi                  | Nama Indikator                                                                   | Nama Data                                                                        | Prioritas / Non Prioritas | Jenis Data | Indikator/ Variabel | Kode Standar Data | Produsen Data                        | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Definisi                                                                                                                                                                                               | Satuan | Klasifikasi Penyajian          | Jadwal Pemutakhiran | Kategori RAD |
|----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|---------------------|--------------|
| 66 | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Persentase pelaku usaha yang meningkat pemahaman nya setelah dilakukan pembinaan | Persentase pelaku usaha yang meningkat pemahama nnya setelah dilakukan pembinaan | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Direktorat Bina Jaminan Produk Halal | Terbuka                        | Angka yang menggambarkan banyaknya pelaku usaha yang mengalami peningkatan pemahaman terkait kewajiban sertifikasi halal dan penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) setelah mengikuti pembinaan. | Persen | Wilayah Administrasi: Nasional | Tahunan             | Agama        |
| 67 | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Persentase SDM Halal yang meningkat pemahaman nya setelah dilakukan pembinaan    | Persentase SDM Halal yang meningkat pemahama nnya setelah dilakukan pembinaan    | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Direktorat Bina Jaminan Produk Halal | Terbuka                        | Angka yang menggambarkan jumlah SDM yang memiliki peningkatan pemahaman tentang regulasi, sistem, dan prosedur Jaminan Produk Halal setelah mengikuti pembinaan.                                       | Persen | Wilayah Administrasi: Nasional | Tahunan             | Agama        |
| 68 | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Persentase Lembaga JPH yang meningkat kinerjanya                                 | Persentase Lembaga JPH yang meningkat kinerjanya                                 | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Direktorat Bina Jaminan Produk Halal | Terbuka                        | Angka yang menggambarkan Jumlah lembaga penyelenggara JPH yang menunjukkan peningkatan kinerja dinilai berdasarkan skor peningkatan kinerja lembaga dalam kurun waktu satu tahun.                      | Persen | Wilayah Administrasi: Nasional | Tahunan             | Agama        |

| No | Sumber Referensi                  | Nama Indikator                                          | Nama Data                                           | Prioritas / Non Prioritas | Jenis Data | Indikator/ Variabel | Kode Standar Data | Produsen Data                              | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                 | Satuan             | Klasifikasi Penyajian                                                                                                                                                                  | Jadwal Pemutakhiran | Kategori RAD |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 69 | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Persentase daerah yang terlibat gerakan sadar halal     | Persentase daerah yang terlibat gerakan sadar halal | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Direktorat Bina Jaminan Produk Halal       | Terbuka                        | Perbandingan antara jumlah daerah yang berpartisipasi dalam pelaksanaan gerakan sadar halal terhadap total daerah yang menjadi sasaran pelaksanaan gerakan sadar halal.                                                                                                  | Persen             | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kab/kota                                                                                                                                               | Tahunan             | Agama        |
|    |                                   |                                                         |                                                     |                           |            |                     |                   |                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                        |                     |              |
| 70 |                                   | Jumlah Pengawas Jaminan Produk Halal (Pengawas JPH)     | Jumlah Pengawas Jaminan Produk Halal (Pengawas JPH) | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal | Terbuka                        | Banyaknya aparatur sipil negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan JPH.                                                                                                                                                                | Orang              | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi                                                                                                                                               | Tahunan             | Agama        |
| 71 |                                   | Jumlah Pengawasan Jaminan Produk Halal (Pengawasan JPH) | Jumlah Pengawasan Jaminan Produk Halal              | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal | Terbuka                        | Banyaknya kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan, baik berupa pengawasan langsung ( <i>on-site</i> ) maupun tidak langsung ( <i>on-desk</i> ), terhadap pelaku usaha yang memproduksi, mengedarkan, dan/atau memperdagangkan produk yang wajib bersertifikat halal. | Kali atau Kegiatan | 1. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi<br>2. Objek Pengawasan: Label Halal, Sertifikat Halal, LPH, Auditor Halal, Penyelia Halal, LP3H, P3H, RPH/U/TPH /U, Rumah Makan/ Resto dll | Tahunan             | Agama        |

| No | Sumber Referensi                  | Nama Indikator                                                             | Nama Data                                                                  | Prioritas / Non Prioritas | Jenis Data | Indikator / Variabel | Kode Standar Data | Produsen Data                              | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Satuan | Klasifikasi Penyajian                                                                                                                            | Jadwal Pemutakhiran | Kategori RAD |
|----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 72 | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Persentase kepatuhan pelaku usaha dan lembaga terhadap penyelenggaraan JPH | Persentase kepatuhan pelaku usaha dan lembaga terhadap penyelenggaraan JPH | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator            | Belum ada         | Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal | Terbuka                        | Persentase Pelaku usaha dan lembaga JPH (LPH dan LP3H) yang memenuhi peraturan perundang-undangan dan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).                                                                                                                                                                                                   | Persen | 1. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi<br>2. Kategorisasi: Pelaku Usaha Mikro & Kecil, Pelaku Usaha Menengah, Pelaku Usaha Besar, LPH, LP3H | Tahunan             | Agama        |
| 73 | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Persentase rekomendasi hasil pengawasan JPH yang ditindaklanjuti           | Persentase rekomendasi hasil pengawasan JPH yang ditindaklanjuti           | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator            | Belum ada         | Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal | Terbuka                        | Persentase dari total rekomendasi hasil pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) yang telah mendapatkan tindak lanjut. Rekomendasi Hasil Pengawasan JPH merupakan tindak lanjut dari hasil pengawasan berupa saran, instruksi, atau arahan tertulis yang dikeluarkan oleh BPJPH kepada pihak yang diawasi berdasarkan temuan hasil pengawasan. | Persen | 1. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi<br>2. Kategorisasi: Pelaku Usaha Mikro & Kecil, Pelaku Usaha Menengah, Pelaku Usaha Besar, LPH, LP3H | Tahunan             | Agama        |
| 74 | Rencana Strategis BPJPH           | Persentase laporan dan temuan hasil                                        | Persentase laporan dan                                                     | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator            | Belum ada         | Direktorat Pengawasan Jaminan              | Terbuka                        | Laporan dan temuan hasil pengawasan adalah dokumen yang                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Persen | 1. Wilayah Administrasi: Nasional,                                                                                                               | Tahunan             | Agama        |

| No | Sumber Referensi                  | Nama Indikator                                                                                                     | Nama Data                                                                                                          | Prioritas / Non Prioritas | Jenis Data | Indikator/ Variabel | Kode Standar Data | Produsen Data                              | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Definisi                                                                                                                                                                                                                                  | Satuan | Klasifikasi Penyajian                                                                              | Jadwal Pemutakhiran | Kategori RAD |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
|    | 2025-2029                         | pengawasan lembaga yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi                                                     | temuan hasil pengawasan lembaga yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi                                        |                           |            |                     |                   | Produk Halal                               |                                | dihasilkan dari kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan JPH oleh BPJPH. Jumlah laporan dari hasil pengawasan terhadap lembaga yang telah dianalisis oleh tim pengawas JPH yang ditugaskan, sehingga menghasilkan rekomendasi yang tepat. |        | Provinsi; dan<br>2. Kategorisasi: LPH, LP3H                                                        |                     |              |
| 75 | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan pelaku usaha dan produk yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi | Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan pelaku usaha dan produk yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal | Terbuka                        | Banyaknya laporan dari hasil pengawasan terhadap Pelaku Usaha dan Produk yang telah dianalisis oleh tim pengawas JPH yang ditugaskan, sehingga menghasilkan rekomendasi yang tepat.                                                       | Persen | 1. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi<br>2. Kategorisasi: mikro & kecil, menengah, dan besar | Tahunan             | Agama        |
| 76 | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Persentase laboratorium penyelenggara JPH yang memenuhi standar                                                    | Persentase laboratorium penyelenggara JPH yang memenuhi standar                                                    | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal | Terbuka                        | Persentase laboratorium yang terlibat dalam proses JPH dan telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, sehingga memastikan akurasi dan integritas dalam melakukan                                                | Persen | Wilayah Administrasi: Nasional                                                                     | Tahunan             | Agama        |

| No | Sumber Referensi                  | Nama Indikator                                                  | Nama Data                                                       | Prioritas / Non Prioritas | Jenis Data | Indikator/ Variabel | Kode Standar Data | Produsen Data                              | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Definisi                                                                                                                                                   | Satuan | Klasifikasi Penyajian                                                                                       | Jadwal Pemutakhiran | Kategori RAD    |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
|    |                                   |                                                                 |                                                                 |                           |            |                     |                   |                                            |                                | pengujian produk halal.                                                                                                                                    |        |                                                                                                             |                     |                 |
| 77 | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Persentase SDM Halal yang mematuhi regulasi penyelenggaraan JPH | Persentase SDM Halal yang mematuhi regulasi penyelenggaraan JPH | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal | Terbuka                        | Persentase SDM halal yang mematuhi regulasi mencerminkan kedisiplinan dan integritas pelaksanaan regulasi pada penyelenggaraan Jaminan Produk Halal        | Persen | 1. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; dan<br>2. Objek: Penyelia Halal, Auditor Halal, Pendamping PPH | Tahunan             | Agama           |
| 78 | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Persentase Pengawas JPH yang mendapat pembinaan                 | Persentase Pengawas JPH yang mendapat pembinaan                 | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal | Terbuka                        | Perbandingan antara jumlah Pengawas JPH yang memperoleh kegiatan pembinaan terhadap total Pengawas JPH.                                                    | Persen | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi                                                                    | Tahunan             | Agama           |
|    |                                   |                                                                 |                                                                 |                           |            |                     |                   |                                            |                                |                                                                                                                                                            |        |                                                                                                             |                     |                 |
| 79 | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas                | Tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas                | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Inspektorat                                | Terbuka                        | Persentase capaian unit kerja dalam memenuhi kriteria pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM berdasarkan hasil penilaian internal dan/atau eksternal. | Indeks | Wilayah Administrasi: Nasional                                                                              | Tahunan             | Aparatur negara |
| 80 | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Survei Penilaian Integritas (SPI)                               | Survei Penilaian Integritas (SPI)                               | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Inspektorat                                | Terbuka                        | Nilai indeks yang menggambarkan tingkat integritas organisasi berdasarkan persepsi pegawai dan pemangku kepentingan.                                       | Indeks | Wilayah Administrasi: Nasional                                                                              | Tahunan             | Aparatur negara |

| No | Sumber Referensi                  | Nama Indikator                                            | Nama Data                                                 | Prioritas / Non Prioritas | Jenis Data | Indikator/ Variabel | Kode Standar Data | Produsen Data | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Definisi                                                                                                                               | Satuan | Klasifikasi Penyajian          | Jadwal Pemutakhiran | Kategori RAD    |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|---------------------|-----------------|
| 81 | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Persentase hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti | Persentase hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Inspektorat   | Terbuka                        | Persentase rekomendasi hasil audit/pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh unit kerja.                                     | Persen | Wilayah Administrasi: Nasional | Tahunan             | Aparatur negara |
| 82 | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Persentase hasil revidu dan pemantauan yang diselesaikan  | Persentase hasil revidu dan pemantauan yang diselesaikan  | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Inspektorat   | Terbuka                        | Persentase kegiatan revidu dan pemantauan yang telah diselesaikan dibandingkan dengan total yang direncanakan.                         | Persen | Wilayah Administrasi: Nasional | Tahunan             | Aparatur negara |
| 83 | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Persentase hasil evaluasi yang ditingkatkan nilainya      | Persentase hasil evaluasi yang ditingkatkan nilainya      | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Inspektorat   | Terbuka                        | Persentase unit kerja yang mengalami peningkatan nilai hasil evaluasi dibanding periode sebelumnya.                                    | Persen | Wilayah Administrasi: Nasional | Tahunan             | Aparatur negara |
| 84 | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Persentase hasil pengawasan lainnya yang dilaksanakan     | Persentase hasil pengawasan lainnya yang dilaksanakan     | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Inspektorat   | Terbuka                        | Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya (di luar audit utama) dibandingkan dengan yang direncanakan.                        | Persen | Wilayah Administrasi: Nasional | Tahunan             | Aparatur negara |
| 85 | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Persentase nilai gratifikasi unit kerja                   | Persentase nilai gratifikasi unit kerja                   | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Inspektorat   | Terbuka                        | Persentase kepatuhan unit kerja dalam pengendalian gratifikasi yang diukur dari pelaporan dan pengelolaan gratifikasi sesuai ketentuan | Persen | Wilayah Administrasi: Nasional | Tahunan             | Aparatur negara |

| No | Sumber Referensi                  | Nama Indikator                                     | Nama Data                                          | Prioritas / Non Prioritas | Jenis Data | Indikator / Variabel | Kode Standar Data | Produsen Data                                               | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Definisi                                                                                                                                                                                   | Satuan | Klasifikasi Penyajian                                  | Jadwal Pemutakhiran | Kategori RAD    |
|----|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 86 | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Persentase pengaduan pelanggaran yang diselesaikan | Persentase pengaduan pelanggaran yang diselesaikan | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator            | Belum ada         | Inspektorat                                                 | Terbuka                        | Persentase pengaduan pelanggaran yang telah ditindaklanjuti dan diselesaikan dibandingkan total pengaduan yang diterima.                                                                   | Persen | Wilayah administrasi: Nasional                         | Tahunan             | Aparatur negara |
| 87 | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Nilai Kapabilitas APIP (IACM)                      | Nilai Kapabilitas APIP (IACM)                      | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator            | Belum ada         | Inspektorat                                                 | Terbuka                        | Tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berdasarkan kerangka <i>Internal Audit Capability Model</i> (IACM), yang menunjukkan kematangan fungsi pengawasan internal. | Indeks | Wilayah administrasi: Nasional                         | Tahunan             | Aparatur negara |
|    |                                   |                                                    |                                                    |                           |            |                      |                   |                                                             |                                |                                                                                                                                                                                            |        |                                                        |                     |                 |
| 88 | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Indeks BerAKHLAK                                   | Indeks BerAKHLAK                                   | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator            | Belum ada         | Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal | Terbuka                        | Nilai hasil pengukuran internalisasi core values ASN BerAKHLAK di lingkungan kerja.                                                                                                        | Indeks | Unit Kerja                                             | Tahunan             | Aparatur negara |
| 89 | Rencana Strategis BPJPH 2025-2029 | Persentase SDM JPH yang meningkat kompetensinya    | Persentase SDM JPH yang meningkat kompetensinya    | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator            | Belum ada         | Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal | Terbuka                        | Persentase SDM yang menunjukkan peningkatan kompetensi berdasarkan capaian minimal 20 JP.                                                                                                  | Persen | 1. Unit Kerja; dan<br>2. Jenis Pengembangan Kompetensi | Tahunan             | Agama           |
| 90 |                                   | Jumlah Profil kompetensi ASN                       | Jumlah profil kompetensi ASN                       | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator            | Belum ada         | Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan              | Terbatas                       | Banyaknya ASN yang memiliki Profil Kompetensi (Pendidikan dan Pelatihan).                                                                                                                  | Orang  | 1. Jenis Pengembangan Kompetensi;<br>2. Jenjang        | Tahunan             | Aparatur negara |

| No | Sumber Referensi | Nama Indikator                        | Nama Data                             | Prioritas / Non Prioritas | Jenis Data | Indikator/ Variabel | Kode Standar Data | Produsen Data                                               | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Definisi                                                             | Satuan   | Klasifikasi Penyajian            | Jadwal Pemutakhiran | Kategori RAD    |
|----|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|---------------------|-----------------|
|    |                  |                                       |                                       |                           |            |                     |                   | Produk Halal                                                |                                |                                                                      |          | Pendidikan; dan<br>3. Unit Kerja |                     |                 |
| 91 |                  | Jumlah pelatihan yang diselenggarakan | Jumlah pelatihan yang diselenggarakan | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal | Terbuka                        | Banyaknya program pelatihan yang dilaksanakan dalam periode tahunan. | Kegiatan | Program Pelatihan                | Tahunan             | Aparatur negara |
| 92 |                  | Tingkat kepuasan peserta pelatihan    | Tingkat kepuasan peserta pelatihan    | Non Prioritas             | Statistik  | Indikator           | Belum ada         | Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal | Terbuka                        | Nilai rata-rata kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan. | Persen   | Program pelatihan                | Tahunan             | Aparatur negara |

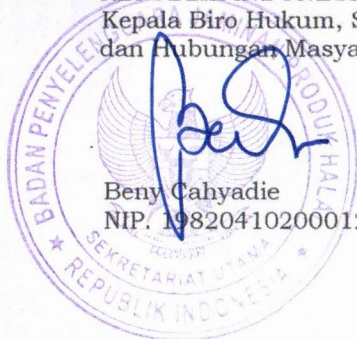
KEPALA BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN PRODUK HALAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AHMAD HAIKAL HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN  
PRODUK HALAL  
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia  
dan Hubungan Masyarakat,



Beny Cahyadi  
NIP. 198204102000121001